

# KRITIK ATAS DEVELOPMENTALISME PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN PERTANIAN

(Studi Kasus Pertanian Organik Dusun Kebur, Cangkringan, Sleman,

D.I. Yogyakarta)

Fuad Setiawan Khabibi<sup>28</sup>

## Abstract

*Organic agriculture in Kebun Orchard is a farming system which has been preserved and passed on from one generation to another. During New Order Era, Organic agriculture was prohibited as it ran against the government developmentalism philosophy. However, severe environmental degradation, which developmentalism brought to bear on agricultural systems, induced farmers to take a stand against the government on organic agriculture. Slowly but surely, farmers unobtrusively embarked on revitalizing organic farming systems. By doing so, farmer's were making a critical statement about government delopmentalism ideology. This article tries to identify factors that contributed to the revitalization of organic agriculture ,long after it had been declared a prohibited practice.*

**Key Words:** organic agriculture, developmentalism, and agriculture

## Pengantar

Sebelum masa pemerintahan Orde Baru, pertanian di Indonesia adalah pertanian tradisional yang didominasi oleh sistem pertanian organik, yaitu sebuah sistem pertanian yang menggunakan bahan-bahan organik secara total dalam proses penanaman, pengelolaan dan pemanenan. Sistem pertanian organik telah lama digunakan oleh petani di Dusun Kebur karena sistem tersebut merupakan warisan leluhur. Oleh karena itu, para petani merasa memiliki keterikatan batin dan memiliki kewajiban moral untuk menjaga dan melestarikan sistem pertanian tersebut.

---

<sup>28</sup> Penulis adalah mahasiswa Pascasarjana JMKP FISIPOL UGM. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: [fuad\\_roots@yahoo.co.id](mailto:fuad_roots@yahoo.co.id).



Bagi para petani, pertanian organik sudah seperti jalan hidup yang telah lama digunakan. Para petani menyakini bahwa pertanian seperti inilah yang ramah lingkungan dan dapat menjaga kesuburan lahan pertanian. Namun, setelah Orde Baru berdiri dan paham liberalisme masuk sebagai bentuk kemenangan atas runtuhnya sosialisme di Indonesia pada tahun 1960-an, kapitalisme mulai berkembang di Indonesia.<sup>29</sup> Kapitalisme di Indonesia mengubah sistem pertanian tradisional yang berpendekatan organik menjadi sistem pertanian modern yang menggunakan pendekatan developmentalis.

Sistem pertanian berideologi developmentalis mengubah banyak hal, terutama tradisi dan budaya pertanian. Metode tradisional diganti dengan cara-cara modern yang lebih praktis dan dianggap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas hasil pertanian. Di Dusun Kebur sendiri penerapan developmentalisme ditandai dengan dipaksanya petani untuk menggunakan pupuk kimia dan bibit padi jenis PB (Petak Baru).

Menurut pemerintah, meninggalkan pertanian organik dan beralih ke pertanian modern merupakan satu-satunya alternatif untuk memajukan pertanian dan meraih *swasembada* beras. Pemerintah beranggapan bahwa pertanian organik dapat mengganggu sistem pertanian nasional yang berkiblat pada ideologi developmentalisme. Oleh karena itu pemerintah melarang sistem pertanian organik dan mulai menekan petani di Dusun Kebur, sebuah dusun yang terletak di Kecamatan Cangkringan tepat di kaki Gunung Merapi, agar mau mengikuti kebijakan developmentalisme-nya.

<sup>29</sup> Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa Presiden Soekarno dekat dengan sosialisme garis keras. Pada masa itu, sosialisme di Indonesia berkembang pesat dengan adanya kedekatan pemerintah dengan Negara-negara sosialisme garis keras (komunisme) seperti China dan Rusia. Penggulingan presiden soekarno dan pemberantasan Partai komunis Indonesia adalah awal baru bagi kemenangan kapitalisme Amerika dan Sekutunya di Indonesia.



Namun, pemerintah tidak serta-merta dapat memaksa dan merubah pola pikir petani di Dusun Kebur untuk mengikuti kebijakannya. Pada awal dipaksakannya kebijakan developmentalis tersebut, petani bersikap *apriori*. Petani menolak berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap berseberangan dengan sistem pertanian organik yang telah lama dikembangkan. Hingga akhirnya pemerintah terpaksa menerjunkan ABRI dan birokrasi untuk mengawasi petani agar mau mengikuti kebijakan pemerintah. Hal senada disampaikan oleh Ir. Iryanti, berikut merupakan penuturannya:

*"Iyaa makanya kalau jaman dulu itu ada ABRI masuk desa itu. Dwifungsi ABRI.. Ya karena apa.. karena dulu itu petani itu masih agak anu ya, maksude belum.. Ya nggak kritis, ho'o tho?. Terus dulu petani itu belum terbuka dalam artian.. dalam artian itu, karena apa... Petani itu kurang apa, maksude kurang dalam SDM... (Oleh karena) Itu (petani) kita taklukan lewat ABRI masuk desa..."*

Penekanan dan pemaksaan untuk menggunakan sistem pertanian ber-ideologi developmentalisme tersebut berlangsung selama 32 tahun (selama rezim Orde Baru masih berdiri). Petani dipaksa, diarahkan dan diawasi tahap demi tahap agar mau menjalankan kebijakan developmentalisme pemerintah. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh salah satu sesepuh sekaligus ketua kelompok petani organik di Dusun Kebur, berikut merupakan penuturan beliau:

*"... Demikian, misalkan kita itu menanam harus begini, harus begini seperti itu. Diarahkan penanamannya harus seperti itu. Diawasi, karena dulu itu tahun 1979 di Dusun Kebur sini, orang itu diarahkan harus seperti ini, harus seperti itu. Dari penanaman padi, bibitnya disediakan oleh pemerintah... Ya seperti itu.. kamu (petani) harus menanam ini sebenarnya INMAS atau BIMAS oleh penyuluh dan sebagainya itu. Itu mendampingi terus ke masyarakat dari dinas, cara menanam, cara memupuk dan cara menanggulangi hama penyakit itu teruuuuus... di damping seperti itu. Jadi masyarakat tinggal melaksanakan gitu..."*

Semenjak saat itu, pertanian organik di Dusun Kebur dilarang oleh pemerintah. Apabila para petani tidak mau meninggalkan pertanian organik dan melaksanakan arahan kebijakan pertanian berpendekatan developmentalisme dari pemerintah, Petani



akan dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI),<sup>30</sup> dan harus diberantas serta dihukum. Petani tersebut akan dianggap sebagai pembangkang dan penghambat pembangunan. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Suratman, berikut merupakan penuturannya:

*"... (Petani) takut pada birokrasi ya, benar-benar tunduk, apa yang diperintahkan (petani tunduk). Karena mungkin adanya peristiwa G30S PKI dulu.. Kan dia (petani) mau melawan takut kan seperti itu (takut dituduh sebagai PKI). Klo tidak manut dituduh PKI. Kemungkinan seperti itu dari masyarakat. Ada perintah dari pemerintah harus kita taati, kalau tidak konsekuensinya seperti itu (dituduh sebagai PKI). Kemungkinan seperti itu, dalam rasa (takut). Terus dia apa yang diperintahkan dia (petani di Dusun Kebur) tunduk..."*

Akan tetapi pada tahun 1986-an, ketika terjadi *leveling off* dan kerusakan ekosistem yang begitu hebat di Dusun Kebur, petani mulai jenuh dengan pemerintah. Petani sadar bahwa harus melakukan perlawanan. Secara diam-diam petani mulai mengembangkan kembali ide untuk kembali ke sistem pertanian organik sebagai bentuk kritik/perlawanan atas ideologi developmentalis yang diadopsi oleh pemerintah dalam membangun pertanian.

Dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan besar, "Bagaimana kritik pertanian organik atas ideologi developmentalisme pemerintah dalam pembangunan pertanian tersebut dilakukan? Dan faktor-faktor apa saja-kah yang mempengaruhi kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur setelah sekian lama sistem tersebut ditekan oleh developmentalisme pemerintahan?"

### Tinjauan Teori

Pada dasarnya teori developmentalisme dibangun oleh bermacam-macam teori modernisme dan logika *production center development*, yaitu sebuah teori yang

<sup>30</sup> Sejak gerakan G30S PKI, Partai Komunis Indonesia (PKI) sangat dilarang di Indonesia. Para pengikut dan simpatisan PKI yang mayoritas berprofesi sebagai petani tradisional, banyak yang dihukum mati dan dibunuh karena dituduh terlibat secara langsung dalam gerakan G30S PKI.



menghendaki bahwa masyarakat akan bergerak dari arah tradisionalisme menuju modernisme agar lebih maju. Sementara itu untuk menuju ke dalam keadaan yang dianggap “lebih maju” tersebut, petani harus mengejar peningkatan produktivitas pertanian. Seperti yang dikatakan oleh Fakih:

*“Pada dasarnya modernism/developmentalisme berasumsi bahwa semua masyarakat, termasuk masyarakat Barat, pernah mengalami tradisionalitas dan akhirnya menjadi modern. Sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah dan harus ditekan agar mau berubah menjadi manusia modern”* (Mansour Fakih, 2009).

Sedangkan pertanian organik adalah pertanian yang digunakan oleh petani dari masa lalu yang dianggap tradisional. Pertanian organik dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang berorientasi kepada petani (*people center development*). Sehingga keduanya memiliki perbedaan pendekatan yang berbeda. Perbedaan itulah yang memicu konflik ideologis antara developmentalisme dengan sistem pertanian berpendekatan organik.

Sutanto, mendefinisikan pertanian organik sebagai suatu sistem produksi pertanian yang berasaskan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Secara lebih luas, Sutanto menguraikan bahwa menurut para pakar pertanian Barat sistem pertanian organik merupakan “hukum pengembalian (*law of return*)” yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanaman maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada tanaman (Sutanto, 2002).

Mengutip pendapat David Korten, Indrian menulis 10 prinsip utama pembangunan pertanian berpendekatan developmentalisme yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan pertanian pada masa Orde Baru. Pada masa



Orde Baru 10 prinsip ini terbukti mampu mengantarkan pemerintahan Orde Baru mewujudkan impian *swasembada* beras, yang akhirnya dicapai pada tahun 1984. Namun, setelah lengsernya rezim Orde Baru, 10 prinsip ini mendapat kritikan tajam dari berbagai kalangan, termasuk kalangan petani di pedesaan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah (David Korten dan Carner dalam Indriana, 2010):

- a. Digunakannya sentralisasi kebijakan untuk menjamin kelancaran program pertanian agar sesuai dengan komando dari pemerintah pusat.
- b. Dijalankannya pendekatan mobilisasi untuk menggerakkan petani yang saat itu masih *monoton* dan belum bisa bergerak secara *swadaya*.
- c. Diterapkannya metode penaklukan. Melalui *dwifungsi* ABRI, pemerintahan Orde Baru mempersempit konflik dan kontestasi sistem pertanian.
- d. Diadopsinya pendekatan eksploitasi. Eksploitasi ini seperti digunakannya sumberdaya alam sebaik mungkin secara intensif. Petani diarahkan untuk berkerja semaksimal mungkin guna memanfaatkan sumberdaya alam di daerahnya untuk mendukung target *swasembada* beras.
- e. Hubungan kerja yang digunakan oleh birokrasi dengan petani bersifat fungsional. Dengan begitu birokrasi dan petani hanya berkerja atas dasar untuk melakukan tugas masing-masing secara professional.
- f. Sistem pertanian yang digunakan bersifat dan berskala nasional, meyeluruh ke semua wilayah di Indonesia. Karena luasnya lahan pertanian dengan diberlakukannya sistem berskala nasional, maka sistem pertanian seperti ini dianggap sebagai cara paling ampuh untuk meningkatkan produksi padi secara nasional.



- g. Sistem pertanian semata-mata bertujuan untuk menggapai pertumbuhan perekonomian setinggi-tingginya (*high economic growth*). Sehingga pertumbuhan perekonomian konvensional dapat dicapai secara maksimal.
- h. Karena terdesak oleh tujuan peningkatan produktivitas pertanian, pemerintah menggalakkan penggunaan saprodi kimia dan alat-alat modern sangat diintensifkan. Pemerintah mengarahkan petani untuk menggunakan pupuk kimia, padi varietas unggul dan pola tanam 3 kali panen dalam 1 tahun.
- i. Birokrasi yang digunakan bersifat komando-intervensionis. Dengan dibantu militer dan masuknya militer kedalam birokrasi (*dwifungsi* ABRI), maka birokrasi menjadi disegani oleh petani. Semua arahan pemerintah yang disampaikan melalui birokrasi akan dipatuhi oleh petani tanpa perlawanan atau protes yang berarti.
- j. Birokrasi menggunakan pendekatan penguasaan dan pengendalian publik untuk menjaga petani agar mau bersungguh-sungguh mengikuti semua arahan program pemerintah.

Pasca hidup kembalinya pertanian organik, ada serangkaian teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hal tersebut, terutama di dusun Kebur, yaitu:

a. Faktor-faktor Internal

Setelah *pre-survey* di lapangan, faktor-faktor internal yang diduga mempengaruhi kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur, seperti terjadinya *leveling off* dan kerusakan lingkungan di Dusun Kebur, terpecahnya kelompok petani hamparan “Sedyo Makmur”, terbentuknya kelompok ternak, pemuliaan bibit varietas lokal secara diam-diam.

b. Faktor-faktor Eksternal



Menurut berbagai kajian literatur dan *pre-survey* dilapangan, ada berbagai faktor yang memperlemah developmentalisme. Berbagai faktor itulah yang berpengaruh terhadap kelahiran kembali sistem pertanian organik. Adapun faktor-faktor itu seperti perubahan sistem pemerintahan, perubahan orientasi kerja birokrasi, perubahan hubungan kerja birokrasi dan kelahiran isu lingkungan. Faktor-faktor tersebut akan dibahas dalam tulisan selanjutnya.

### **Kritik Pertanian Organik Atas Ideologi Developmentalisme Pemerintah**

Pengadopsian developmentalisme ke dalam batang tubuh kebijakan pertanian Indonesia ini diawali pada tahun 1965/1966, yaitu ketika pemerintahan Orde Baru mulai menyusun sebuah program revolusioner untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Program pertanian tersebut hingga kini dikenal dengan BIMAS (Bimbingan Masal) dan INMAS (Intensifikasi Masal). Walaupun kedua program tersebut sudah lama ditinggalkan, namun dalam prakteknya prinsip-prinsip developmentalis masih diadopsi hingga saat ini. Pengadopsian ideologi developmentalis ke dalam tubuh kebijakan pembangunan pertanian ini semata-mata untuk meningkatkan hasil panen petani di Dusun Kebur. Di bawah tongkat komando pemerintahan, petani di Dusun Kebur dituntut untuk "*sendhiko-dhawuh*", mematuhi arahan-arahan pemerintah yang dimanifestasikan dalam program BIMAS, INMAS dan berbagai program developmentalisme lainnya.

Baru beberapa tahun ideologi developmentalis digunakan oleh pemerintah dalam membangun pertanian, ideologi ini berdampak positif bagi peningkatan produksi beras dan pendapatan petani di berbagai wilayah. Digunakannya sarana produksi modern, bibit unggul dan digunakannya pupuk serta pestisida kimia merupakan latar belakang mengapa developmentalisme berhasil meningkatkan produktivitas pertanian



secara signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang ketua kelompok petani organik di Dusun Kebur, Bapak Suratman. Beliau mengungkapkan bahwa:

*"...Misalkan dulu (sebelum diterapkannya pertanian developmentalisme) ya per hektar itu cuma berapa ton. Sekitar 4-5 ton ya dengan pemakaian pupuk kimia itu bisa mencapai 9-10 ton per hektar. Meningkatkan dua kali lipatnya. Sementara di Dusun Kebur ada 20 hektar..."*

Keberhasilan penerapan developmentalisme dalam kebijakan pembangunan pertanian Indonesia mencapai pucaknya pada tahun 1984, di mana Indonesia di bawah kepemimpinan mantan presiden Soeharto mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil mencapai target *swasembada* beras. Pada Juli 1986, Eddouard Saouma menyebut Soeharto sebagai lambang perkembangan pertanian Internasional. Ia tiba di Jakarta untuk menyerahkan penghargaan berupa medali emas dari FAO.<sup>31</sup>

Namun, setelah terjadinya *leveling off* pada tahun 1986, produksi padi menurun drastis dengan diikuti penurunan kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan. Petani di Dusun Kebur mulai tidak menyukai pertanian developmentalis pemerintah tersebut. Karakter pertanian developmentalis dianggap membawa dampak buruk bagi pertanian di Dusun Kebur. Developmentalis mendapat kritikan tajam dari para petani, terutama dari kalangan petani yang ingin kembali ke sistem pertanian organik. Adapun karakter developmentalisme pemerintah yang dikritik oleh petani tersebut seperti berikut:

- a. Digunakannya sentralisasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan dari pemerintah pusat seringkali berseberangan dan tidak sesuai dengan karakter dan potensi pertanian di Dusun Kebur.

<sup>31</sup> Rubrik : Berita Umum. Minggu, 27 Januari 08. Soeharto dan Swasembada Pangan. <http://www.koraninternet.com/> diakses pada 10 Juni 2011.



- b. Digunakannya mobilisasi sebagai metode untuk menggerakkan petani agar mau berperan aktif dalam pembangunan pertanian melalui tekanan dan paksaan yang begitu besar.
- c. Digunakannya metode penaklukan untuk menaklukan petani agar mau mengikuti semua arahan pemerintah. Penaklukan tersebut umumnya dilakukan dengan menggerakkan ABRI untuk memaksa petani agar mau menerima produk-produk pertanian developmentalis melalui program ABRI masuk desa.
- d. Digunakannya pendekatan eksploitasi/ bersifat eksploitatif dalam pertanian. Petani di Dusun Kebur seringkali dipaksa mengejar target panen 3 kali setahun tanpa henti dengan target panen 9-10 ton/hektar. Sehingga petani dan lahan pertanian di Dusun Kebur merasa dieksploitasi oleh target swasembada beras pemerintah.
- e. Digunakannya hubungan yang bersifat fungsional oleh pemerintah. Petani merasa diposisikan sebagai budak yang dipaksa, bukan mitra dalam pertanian.
- f. Terakhir yang dikritik oleh petani di Dusun Kebur adalah digunakannya sistem pertanian berbasis nasional untuk menjamin kelancaran kebijakan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan (*sustainability*).
- g. Penggunaan pendekatan-pendekatan itu semata-mata untuk mengajar swasembada beras, guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian konvensional. Namun mulai tahun 1986-an, lingkungan di Dusun Kebur menjadi rusak akibat dieksploitasi secara besar-besaran dengan menggunakan *saprodi* kimia yang tidak ramah lingkungan, sehingga petani di Dusun Kebur terpaksa melakukan berbagai perlawanan sebagai bentuk nyata dari kritik atas ideologi developmentalisme pemerintah.



*Perlawanan Tertutup (Periode 1986-1999)*

Adapun sebagai bentuk kritik dari ketidaksukaan petani terhadap ideologi developmentalisme tersebut dilakukan dengan menggunakan perlawanan secara tertutup mulai tahun 1986 hingga 1999. Perlawanan dilakukan secara diam-diam karena kondisi ekosistem di Dusun Kebur mulai menunjukkan kerusakan, hasil panen mulai menurun drastis (*leveling off*), sementara pemerintahan Orde Baru masih kuat dengan *dwifungsi* ABRI-nya. Sehingga petani takut mendapatkan label sebagai anggota PKI jika mereka melawan kebijakan pemerintah secara terbuka. Secara diam-diam salah seorang petani berani memunculkan ide gagasan untuk kembali ke pertanian organik dengan menggunakan pupuk organik dan padi varietas lokal. Pada awalnya ide-nya hanya sederhana,

*“Bagaimana jika mereka mengurangi saprodi kimia dan sedikit demi sedikit dan beralih menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak?”.*  
*“Bagaimana jika petani mengganti padi PB (Petak Baru) dengan padi varietas lokal yang dimiliki oleh petani di Dusun Kebur?”.*

Beberapa petani menganggap bahwa produktivitas padi turun karena tanah mulai rusak akibat penggunaan saprodi kimia. Selain itu, petani juga beranggapan bahwa padi PB yang disediakan pemerintah sangat boros akan pupuk kimia, sehingga penanaman padi jenis PB hanya akan memperburuk kondisi lahan persawahan di Dusun Kebur. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suratman, berikut merupakan kutipan wawancaranya, *“... Tanaman padi seperti PB (Petak Baru) itu dia dengan rakusnya pupuk kimia, maka dia kalau tidak pakai pupuk kimia dia tidak akan panen...”*.

Ide gagasan ini tentu sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang masih berkuat pada BIMAS dan INMAS. Jika petani tidak menggunakan padi varietas PB, maka secara langsung petani berseberangan dengan kebijakan pemerintah dan mengganggu proses serta tujuan pembangunan nasional. Petani mengetahui hal itu, oleh karena itu mereka secara diam-diam membicarakan ide gagasan revolusioner itu dalam



sebuah pertemuan kecil yang tertutup. Bapak Suratman dan beberapa petani yang telah setuju kembali ke sistem pertanian organik kemudian melakukan penyadaran internal dengan memberikan keteladanan bahwa pertanian organik lebih baik dari pada pertanian kimia. Pertanian organik lebih murah, karena pupuk dibuat dari kotoran ternak, dedaunan sampah dan sekam. Walaupun pada saat itu petani yang mulai kembali ke organik belum mampu menunjukkan hasilnya, setidaknya petani mampu menunjukkan pupuk organik lebih murah. Adapun hal-hal yang mulai dicontohkan oleh petani organik pada saat itu masih terbatas pada penggunaan pupuk organik dan padi varietas lokal secara diam-diam. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Suratman, “... Dengan adanya percontohan-percontohan dan sebagainya, itu dari masyarakat melihat sendiri secara langsung, itu dia akan sadar akan adanya (dampak baik dari) kegiatan seperti itu...”.

Sedangkan secara teknis, langkah awal yang petani lakukan untuk menyadarkan petani lainnya adalah dengan cara mengajak satu persatu petani dalam sebuah forum kecil. Cara ini sangat sulit. Dari 60 petani yang telah bergabung menjadi petani organik pada saat ini, pada awal pencetusan ide untuk kembali ke organik hanya ada 10 petani yang mau bergabung. Itu pun dengan perjuangan yang panjang. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suratman, “... (Kalau penyadaran internal) itu dengan kelompok. Kelompok tani, bagaimana kita harus merubah sikap, merubah cara pola tanam dan sebagainya. Yaa.. itu..”.

Sikap dan pencetusan ide untuk kembali ke pertanian organik ini bisa dibaca sebagai resistensi atau perlawanan secara tertutup, karena secara diam-diam petani mulai tidak suka dengan pertanian developmentalisme dan mengembangkan kembali sistem pertanian yang sebenarnya telah dilarang oleh pemerintahan Orde Baru semenjak diimplementasikan-nya BIMAS dan INMAS.



Meski demikian, perjuangan untuk kembali mengadopsi pertanian organik bukanlah perjuangan yang mudah dan lancar tanpa hambatan. Dalam kondisi sosial-politik yang belum kondusif semasa pemerintahan Orde Baru, ide ini awalnya mendapatkan kecaman dari beberapa petani yang tidak setuju dengan ide revolusioner tersebut. Pada umumnya beberapa petani itu takut dengan tekanan sistem yang ada. Mereka trauma dengan adanya pengawasan yang begitu ketat dari pemerintah. Oleh karena itu, ide untuk kembali ke organik ini memunculkan sebuah konflik kepentingan di dalam masyarakat Dusun Kebur.

Pada masa itu, masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani terpecah menjadi dua kelompok, mereka yang setuju kembali ke organik dan mereka yang belum setuju untuk kembali ke sistem pertanian organik. Walaupun konflik itu sendiri tidak terjadi dalam eskalasi yang besar dan menimbulkan perseteruan dengan jalan kekerasan, namun konflik itu sendiri hampir memecah kelompok petani.

#### *Perlawanan Terbuka (1999-Sekarang)*

Tahun 1999, setelah reformasi dan terjadi perubahan sistem pemerintahan, pengawasan dan intervensi pemerintah dalam hal pertanian mulai melunak. Sikap pemerintah yang semula *komando-intervensionis* lambat laun berubah menjadi *partisipatif-otonomus* karena terjadi perubahan konstitusional. Karena terjadi perubahan peraturan perundangan dan kebijakan, organisasi dan aspirasi petani yang semula ditekan menjadi bebas. Petani bebas berorganisasi dan mengutarakan pendapatnya dalam sebuah forum baik formal ataupun non-formal. Ini menjadi sebuah angin segar bagi perjuangan petani di Dusun Kebur untuk kembali ke mengadopsi sistem pertanian organik. Petani yang semula diam-diam bergerak di bawah radar menjadi semakin berani dan terbuka dalam bergerak.



Bapak Suratman dan rekan-rekan petani yang pro-organik mulai berkampanye, melakukan penyadaran internal dalam sebuah forum terbuka agar para petani mau kembali mengadopsi pertanian organik untuk memperbaiki kerusakan lingkungan. Penyadaran internal tersebut biasanya dilakukan dalam pertemuan rutin kelompok petani Sedyo Makmur di Dusun Kebur. Pertemuan tersebut dilakukan setiap 35 hari sekali, setiap *padang mbulan* (bulan purnama). Seperti organisasi informal di Jawa lainnya, pertemuan tersebut dilakukan setiap tanggal 15 dalam penanggalan Jawa, agar mudah diingat oleh para petani di Dusun Kebur.

Meski demikian, ada permasalahan yang dihadapi petani. Semenjak tahun 1965 hingga 1999, bibit padi varietas lokal di Dusun Kebur sudah banyak yang menghilang dari ladang persawahan karena program BIMAS dan INMAS yang mengharuskan petani menanam padi jenis PB (Petak Baru). Oleh karena itu, penggunaan kembali bibit varietas lokal di Dusun Kebur pasti ada yang mensuplai atau menyediakan bibit varietas lokal tersebut, sehingga petani dapat menanam kembali padi varietas lokal di ladang persawahannya. Dari hasil wawancara di lapangan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan pertanian organik, selama ini petani menggunakan 2 jenis bibit, yaitu bibit varietas unggul yang disuplai oleh pemerintah dan bibit varietas unggul daerah yang dimiliki oleh petani Dusun Kebur.

Bibit varietas lokal didapat sebagai hasil pemuliaan secara diam-diam oleh petani di Dusun Kebur selama kurun waktu tahun 1965-sekarang, sedangkan bibit varietas dari pemerintah merupakan bantuan langsung dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman mulai tahun 2000-sekarang. Pemberian bantuan benih organik tersebut untuk mendukung program Go Organik 2010 yang hendak diimplementasikan oleh pemerintah di beberapa wilayah di Indonesia. Petani di Dusun Kebur mengembangkan



benih padi lokal secara swadaya sebagai bentuk kritik atas ideologi developmentalisme pemerintah.

Dari sisi pengelolaan, pertanian organik di Dusun Kebur dikelola oleh petani melalui kelompok petani organik yang dikenal dengan Sedyo Makmur. Kelompok petani ini terbentuk pada masa pemerintahan developmentalis Orde Baru, yaitu sekitar tahun 1986-an. Pada awalnya kelompok petani ini berupa kelompok petani hamparan, yaitu kelompok petani yang dibentuk untuk mengelola pertanian di beberapa Dusun. Dusun Kebur Kidul, Dusun Kebur Lor, Dusun Randusari adalah beberapa daerah yang dahulu kala bernaung di bawah organisasi petani ini.

Namun, semenjak lengsernya pemerintahan Orde Baru dan semenjak adanya peraturan bahwa setiap Dusun harus membentuk kelompok sendiri, maka kelompok Sedyo Makmur ini hanya bernaung di bawah kelompok petani di Dusun Kebur Kidul. Hal tersebut dikarenakan pada awal terbentuknya Sedyo Makmur, kelompok ini merupakan bentukan dari para petani di Dusun Kebur Kidul. Sedangkan saat ini Dusun Kebur Lor dan Dusun Randusari memiliki kelompok pertanian tersendiri.

Mengenai penjualan hasil panene, para petani ini memiliki mekanismenya sendiri. Tidak seperti petani di daerah lain yang sudah menjual hasil panen padi organiknya melalui organisasi petani organik seperti MAPORINA dan organisasi lainnya, hasil panen petani masih menjual hasil panen padinya ke pedagang biasa atau pengepul hasil panen. Belum ada jaringan LSM ada NGO yang berkerjasama dengan baik dengan petani organik di Dusun Kebur. Penjualan hasil panen pertanian organik biasanya dilakukan 3 atau 4 kali dalam setahun. Sedangkan untuk varietas lokal, penjualan dilakukan 2 kali dalam setahun. Pembeli umumnya datang secara langsung ke Dusun Kebur untuk mengambil hasil panen padi organik. Selain menjual



padi organik, petani di Dusun Kebur juga memperoleh keuntungan dari penjualan sayuran organik yang ditanam di Dusun Kebur.

## **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelahiran Kembali Sistem Pertanian Organik Di Dusun Kebur**

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kelahiran kembali pertanian organik.

### **1. Faktor Eksternal.**

#### **a. Pergantian Sistem Pemerintahan**

Pergantian sistem pemerintahan Orde Baru yang bersifat otoritarian ke sistem demokrasi adalah momentum bagi pertanian organik untuk lahir kembali. Pergantian otoritarianisme menjadi demokrasi telah menggeser sentralisasi kebijakan menjadi desentralisasi kebijakan pertanian. Pemerintah Orde Baru sangat otoriter, sehingga petani dipaksa menggunakan berbagai padi pilihan pemerintah. Hal tersebut seperti yang disampaikan Bapak Suratman. Berikut merupakan kutipannya:

*“Yaa diawasi.. otoriter.. karena dulu itu tahun 1979 di dusun kebur sini, orang itu diarahkan harus seperti ini, harus seperti itu. Dari penanaman padi, bibitnya disediakan oleh pemerintah... Yaa hasilnya itu meningkat, tapi kami sesalkan seperti tadi, tanahnya akhirnya rusak seperti itu. Misalkan itu digali sebaik-baiknya, akhirnya akibatnya kekurangan unsur hara.*

Namun, wewenang kekuasaan pemerintah pusat kini bergeser ke pemerintah daerah, sehingga sistem pertanian berbasis nasional berubah menjadi sistem pertanian yang berbasis teritorial. Setiap daerah (teritorial) berhak menggunakan dan mengadopsi sistem pertanian sesuai dengan potensi dan karakteristik daerahnya. Hal inilah yang membuka lembaran baru bagi petani untuk kembali ke pertanian organik.

#### **b. Perubahan Orientasi Kerja Birokrasi**

Setelah terjadi pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, birokrasi di daerah mulai merubah orientasi kerjanya. Pada awalnya, untuk menggapai swasembada beras,



birokrasi pada masa Orde Baru berorientasi kerja untuk melakukan penguasaan dan pengendalian publik. Namun, sekarang orientasi birokrasi telah berubah menjadi pemberdayaan publik dan demokratisasi. Adanya pemberdayaan publik dan demokratisasi ini dibenarkan oleh Bapak Suratman. Berikut merupakan penuturan beliau:

*“Betul... betul kalau sekarang mendukung bener-bener mendukung pertanian organik, maka banyak dari pemerintah itu mengadakan pemberdayaan, penyuluhan, mengadakan bimbingan-bimbingan, mengadakan pendampingan untuk kembali ke organik...”*

Dengan perubahan orientasi kerja birokrasi tersebut, maka terjadi perubahan pendekatan di lapangan, yaitu pendekatan eksploitasi untuk mengejar pertumbuhan perekonomian konvensional menjadi pelestarian yang diarahkan untuk mewujudkan keswadayaan lokal. Situasi inilah yang mendukung bagi sistem pertanian organik di Dusun Kebur untuk bertumbuh-kembang kembali.

#### c. Perubahan Sistem Hubungan Kerja Birokrasi

Pada masa pemerintahan Orde Baru, hubungan kerja antara birokrasi dengan petani bersifat komando-intervensionis, di mana birokrasi harus mengarahkan dan mengintervensi secara ketat penerapan sistem pertanian di lapangan. Namun, kini sistem hubungan kerja antara birokrasi dengan petani sudah berubah menjadi propartisipan-otonomus, di mana birokrasi sangat menghargai kemerdekaan petani dalam berpendapat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan, pelaksanaan dan monitoring sebuah kebijakan pertanian.

Hal itu telah mengubah pendekatan lama birokrasi yang dahulu sering diterapkan di Dusun Kebur, yaitu perubahan dari pendekatan yang bersifat mobilisasi, penaklukan, hubungan fungsional menjadi partisipasi, pemberdayaan dan berdasarkan hubungan jejaring sosial. Perubahan hubungan kerja inilah yang memberi ruang bagi



sistem pertanian organik untuk berkembang kembali setelah sekian lama ditekan oleh pemerintahan Orde Baru.

Perubahan sistem hubungan kerja birokrasi ini membuat birokrasi lebih terbuka dan akrab dengan petani. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Suratman, berikut merupakan petikan wawancara dengan beliau:

*"Kalau sekarang (birokrasi) sudah terbuka.. Iya lebih akrab.. ee akrabnya itu karena dia dekat karena ada perintah, kalau sekarang akrabnya kita mencari informasi kemudain disampaikan kepada pemerintah untuk disampaikan kepada petani, gitu. Kalau dulu dari program atas jadi dekatnya seperti itu kalau dulu. Kalau dekatnya ini dia mencari aspirasi, disampaikan ke pemerintah..."*

#### d. Kelahiran Isu Lingkungan

Kelahiran isu lingkungan sangat berpengaruh dalam proses kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur. Kondisi lingkungan dan kesuburan tanah yang semakin memburuk mengharuskan petani untuk kembali mengadopsi sistem pertanian organik. Kelahiran isu lingkungan ini telah merubah program pemerintah yang semula tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan (unsustainability) menjadi sangat fokus terhadap aspek keberlanjutan lingkungan (sustainability).

Tidak diperhatikannya aspek keberlanjutan lingkungan pada masa Orde Baru ini juga dibenarkan oleh Ir. Iryanti. Berikut merupakan penuturannya:

*"Lha iya orde baru itu kan cuma produksi, produktivitas. Cuma produksi yang dikejar. Dia nggak melihat efek peningkatan produksi yang selalu berdampak buruk terhadap lingkungan... Tapi dulu kan ada sedikit saja langsung disemprot. Dulu kan memang ya itu REPELITA itu kan ada pencaanangan swasembada pangan, beras itu ya.. Jadinya dia kurang memperhatikan ramah lingkungan lah. Akhirnya ya itu..keberlanjutan itu kan akhirnya tanahnya rusak.. kesuburannya kurang, akhirnya banyak varietas-varietas yang terbunuh. Karena kan varietas lokal kan dia tidak menggunakan apa. Kalau varietas lokal kan pupuknya organik. Yaa kalau IR yang varietas-varietas unggul baru itu lho. PB, IR 64 ka dulu ada IR 65 apa berapa ya..."*



## 2. Faktor Internal

### a. Terjadinya *Leveling off* dan Kerusakan Lingkungan di Dusun Kebur

*Levelling off* dan kerusakan lingkungan sebenarnya membawa dampak buruk bagi petani di Dusun Kebur secara umum. Namun berkat peristiwa ini petani di Dusun Kebur menjadi sadar akan dampak buruk dari pengadopsian pertanian developmentalis yang dipaksakan oleh pemerintah. Beberapa tokoh pelopor pertanian organik di Dusun Kebur memanfaatkan momentum ini untuk mengajak para petani agar mau kembali ke sistem pertanian organik yang jauh lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu *leveling off* dan kerusakan lingkungan di Dusun Kebur disebut sebagai faktor internal yang sangat mempermudah atau mendukung (*enabling factor*) para pelopor pertanian organik untuk mengajak petani lainnya agar mau mengadopsi sistem pertanian organik di Dusun Kebur. Hal senada disampaikan oleh Bapak Suratman, berikut merupakan kutipan wawancaranya:

“... Karena kalau kita tidak menggunakan organik nanti tanahnya rusak itu tadi.. Jadi kesuburan kurang, maka rata-rata menggunakan pupuk kandang, pupuk organik itu.. Untuk menunjang kesuburan tanah.. Kalau menggunakan pupuk kimia nanti hasilnya kurang.. Rata-rata petani sudah sadar dengan pemupukan kimia terus menerus petani sudah merusak tanah...”.

### b. Terpecahnya Kelompok Petani Hamparan “Sedyo Makmur”

Terpecahnya kelompok petani hamparan “Sedyo Makmur” terjadi karena kelompok petani tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengatasi *leveling off* pada tahun 1986-an. Setelah kelompok petani hamparan terpecah menjadi kelompok petani per-Dusun, petani mendirikan kelompok petani dengan nama serupa di Dusun Kebur. Dengan berdirinya kelompok petani Sedyo Makmur di Dusun Kebur, para petani yang menjadi pelopor pertanian organik menjadi semakin mudah untuk melakukan penyadaran internal, mengajak petani lainnya untuk kembali mengadopsi pertanian organik. Hal ini terjadi karena hambatan yang dihadapi oleh para petani yang setuju



kembali ke organik menjadi semakin berkurang. Terpecahnya kelompok “Sedyo Makmur” tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Suratman. Berikut merupakan penuturannya:

*“... Terbentuknya Sedyo Makmur itu kalau yang dulu-dulunya itu sejak Orde Baru itu sudah terbentuk. Tapi terus dia itu ada perkembangan-perkembangan, karena kan dulu ada beberapa dusun ya.. Karena kan dulu misalkan kelompok hamparan, sekarang tiap-tiap dusun harus membentuk kelompok sendiri. Kalau kelompok hamparan kan dulu Kebur lor, Kebur kidul sama Randusari itu satu kelompok. Kan sekarang sudah sendiri-sendiri. Kebur lor sendiri, Randusari sendiri, Kebur Kidul sendiri. Tapi yang kebur kidul itu embrionya tetap Sedyo Makmur...”*

#### c. Terbentuknya Kelompok Ternak

Semenjak terbentuknya kelompok ternak, petani di Dusun Kebur semakin mudah mengembangkan sistem pertanian organiknya. Kelompok ternak menyumbang peran terbesar dalam perjalanan petani untuk kembali ke sistem pertanian organik. Hal itu terjadi karena petani di Dusun Kebur mendapatkan bahan baku pembuatan pupuk organik dari kotoran ternak dan dedaunan. Oleh karena itu, setelah terbentuknya kelompok ternak, petani di Dusun Kebur menjadi semakin mudah dalam pengumpulan bahan baku pembuatan pupuk organik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suratman. Berikut adalah petikan wawancaranya, *“...Pertanian organik itu sekitar sejak kita membentuk kelompok ternak. Itu dari warga sudah konsen terhadap pupuk organik...”*

#### d. Pemuliaan Bibit Varietas Lokal Secara Diam-diam

Pemuliaan bibit varietas lokal secara diam-diam merupakan salah satu faktor pendukung (*enabling factor*) bagi kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur. Dengan adanya penanaman secara diam-diam tersebut padi varietas lokal di Dusun Kebur masih ada dan dilestarikan oleh para petani. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Suratman. Berikut merupakan penuturan beliau:



*"... Itu diluar sepengetahuan birokrasi, yaa seperti itu tadi... Iyaa dengan cara sembunyi-sembunyi seperti itu.. akhirnya tanaman-tanaman yang dahulu masih (ada itu karena) dilestarikan seperti itu.. Kalau tidak seperti itu mungkin sudah punah.. iyaa..".*

Usaha pelestarian padi pada masa lampau itulah yang sangat mendukung bagi perkembangan kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur. Mengingat pertanian organik di Dusun Kebur hingga saat ini sedang gencar-gencarnya menggunakan padi varietas lokal karena padi tersebut cocok dengan pupuk organik dan lebih baik secara kualitas dibanding padi varietas unggul pilihan pemerintah.

## Penutup

Ide untuk kembali ke sistem pertanian organik merupakan sebuah kritik dari petani Dusun Kebur terhadap pengadopsian ideologi developmentalisme oleh pemerintah dalam pembangunan pertanian. Petani di Dusun Kebur tidak suka dengan karakter developmentalisme yang dijalankan oleh pemerintah. Adapun sebagai bentuk kritik dari petani terhadap ideologi developmentalisme tersebut dilakukan dengan menggunakan perlawanan secara tertutup (1986-1999) dan terbuka (1999-sekarang). Perlawanan secara tertutup tersebut dilakukan secara diam-diam karena kondisi ekosistem di Dusun Kebur mulai menunjukkan kerusakan. Perlawanan tertutup tersebut diawali dengan memunculkan ide untuk kembali mengadopsi pertanian organik. Ide tersebut diikuti dengan propaganda, kesadaran internal dan pergerakan. Sedangkan perlawanan terbuka dilakukan setelah keruntuhan rezim Orde Baru, yaitu pada tahun 1999. Perlawanan secara terbuka tersebut dilakukan dengan melakukan propaganda dan pergerakan. Pergerakan yang dilakukan petani Dusun Kebur seperti penyediaan bibit padi, pengelolaan pertanian dan penjualan hasil panen padi organik secara swadaya tanpa campur tangan dari pihak manapun.



Setidaknya ada 4 faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur, Cangkringan, Sleman, D.I. Yogyakarta. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah: pergantian sistem pemerintahan, perubahan orientasi kerja birokrasi, perubahan sistem hubungan kerja birokrasi, kelahiran isu lingkungan. Sedangkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kelahiran kembali sistem pertanian organik di Dusun Kebur seperti terjadinya *leveling off* dan kerusakan lingkungan di Dusun Kebur, terpecahnya kelompok petani hamparan “Sedyo Makmur”, terbentuknya kelompok ternak dan pemuliaan bibit varietas lokal secara diam-diam.

Atas temuan ini, ada sejumlah saran yang layak untuk dipertimbangkan. Agar sistem pertanian organik ini dapat terjaga keberlanjutannya, petani perlu sebuah komitmen dan konsensus aturan yang kuat, karena developmentalisme masih subur di Indonesia. Konsensus tersebut harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis. Peraturan ini dapat berupa keputusan bersama dalam masyarakat atau peraturan legal-formal dari pemerintah yang disusun dengan pendekatan *bottom-up* untuk menghormati Dusun Kebur sebagai kampung yang ingin kembali ke sistem pertanian organik.

Sebagai tindak lanjut dari kritik terbuka yang dijalankan oleh petani organik, kelompok petani di Dusun Kebur juga harus memperkuat keswadayaan lokalnya dengan merevitalisasi koperasi Sedyo Makmur sebagai badan swadaya yang berfungsi sebagai pemberi bantuan modal bagi petani. Keswadayaan lokal adalah kunci pertama yang harus dibangun agar petani tidak terjebak dalam produk-produk kebijakan developmentalis dan diintervensi oleh kepentingan pihak manapun yang ingin mengeksploitasi petani.



## Referensi

- Fakih, Mansour. 2009. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 200.
- Korten, David dan Carner dalam Indriana. 2010. "Dari Revolusi Hijau ke Pertanian Organik: Pergeseran Paradigma Pembangunan" diakses melalui <http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/41056/Bab%202%202010hin.pdf?sequence=3> diakses pada 23 april 2011.
- Rubrik : Berita Umum. Minggu, 27 Januari 08. Soeharto dan Swasembada Pangan. <http://www.koraninternet.com/> diakses pada 10 Juni 2011.
- Suparjan dan Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media. Halaman 2.
- Sutanto, Rachman. 2002. *Pertanian organik: menuju pertanian alternatif dan berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suwarsono dan Alvin Y. SO. 2006, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES. Hal 16.
- Totok Mardikanto. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian: Acuan Untuk Pelajar, Mahasiswa, Dosen, Penyuluh, Pekerja-Sosial, Penentu Kebijakan dan Peminat Ilmu/Kegiatan Penyuluhan Pembangunan*. Sebelas Maret University Press: Surakarta. Hal 2.
- Wahid, Hasyim. 1999. *Telikungan Kapitalisme Global dalam Sejarah Kebangsaan Indonesia*. LKiS: Yogyakarta.